

IMPLEMENTASI PROGRAM KESEJAHTERAAN LANSIA DI UPTD PESANGGRAHAN PMKS MOJOPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO

Sheryn Wijayanti

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
sherynwijayanti17@gmail.com

Indah Prabawati, S. Sos., M.Si

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Program Kesejahteraan Lansia merupakan program pemberian bantuan sosial kepada lanjut usia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yang dilakukan baik di dalam panti maupun di luar panti dengan batas usia 55 tahun ke atas. Salah satu daerah yang melaksanakan Program Kesejahteraan Lansia adalah Kabupaten Mojokerto. Program Kesejahteraan Lansia dilaksanakan di luar panti berupa pemberian bantuan sosial dan di dalam panti dalam bentuk pemberian pelayanan dan rehabilitasi, salah satunya adalah di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit dengan cara menampung dan memberi pelayanan serta rehabilitasi kepada para lansia di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berdasarkan 4 (empat) indikator dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward III antara lain: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian Implementasi Program Kesejahteraan Lansia Di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto, yaitu: 1) Komunikasi, masih belum konsisten karena dalam pelaksanaan kegiatan masih ada kegiatan yang tidak terlaksana, komunikasi yang diberikan dalam setiap kegiatan pun sudah baik karena pelaksana selalu melakukan komunikasi dan koordinasi di setiap kegiatan, selain itu pesanggrahan juga menjalin kerjasama dengan instansi lain untuk menjalankan program kesejahteraan lansia, 2) Sumberdaya, masih kurang karena masih banyak fasilitas sarana prasarana yang perlu di ganti dan di perbaiki untuk kenyamanan keberlangsungan program kesejahteraan lansia, selain itu pesanggrahan juga masih bergantung pada sumber dana pihak ke 3 (tiga), 3) Disposisi, masih belum memenuhi karena masih ada kelompok sasaran yang merasa kurang puas atas sikap yang ditunjukkan oleh para pelaksana dan membuat ketidak puasan kelompok sasaran, 4) Struktur Birokrasi, sudah menunjukkan struktur organisasi yang tidak terfragmentasi yaitu jelas, tidak berbelit-belit dan mudah dalam pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto belum berjalan dengan baik. Saran dari peneliti adalah lebih konsisten lagi dalam melayani lansia Program Kesejahteraan lansia, dan perlu adanya penambahan anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana serta pengadaan kembali kegiatan yang sudah tidak terlaksana.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Sosial, Program Kesejahteraan Lansia

Abstract

The Elderly Welfare Program is a program that provides social assistance to the elderly with social welfare problems, this program conducted inside or outside the institution with an age limit of 55 years and over. One of the

regions implementing the Elderly Welfare Program is Mojokerto Regency, The Elderly Welfare Program is implemented outside the institution in the form of providing social assistance and in the institution by providing services and rehabilitation, one of them in UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit by accommodating and providing services and rehabilitation to the elderly in Mojokerto Regency. Aims to describe and analyze the Implementation of the Elderly Welfare Program in UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit, Mojokerto Regency. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The focus of the research is based on 4 (four) policy implementation criteria according to George C. Edward III which include: Communication, Resource, Disposition, and Bureaucratic Structure. Data was collection through observation, interviews, and documentation. The data analysis is carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. Research Results of the Implementation of the Elderly Welfare Program in UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit, Mojokerto Regency, namely: (1) Communication, still not consistent because in the implementation of activities there are still activities that are not carried out, the communication provided in each activity is already good because the implementers always carry out communication and coordination in every activity, apart from that the pesanggrahan also establishes cooperation with other agencies to run the elderly welfare program, (2) Resource, still lacking because there are still a lot of infrastructure facilities that need to be replaced and repaired for the convenience of the sustainability of the elderly welfare program, besides that housing is also still dependent on third party funding sources, (3) Disposition, not satisfy because there are still target groups who are not satisfied with the attitude displayed by the implementers and make the target group dissatisfied (4) Bureaucratic Structure, has shown a fragmented organizational structure that is clear, straightforward and easy to supervise. Accuracy, the implementation of the Elderly Welfare Program in UPTD Pesanggrahan Mojopahit PMKS Mojokerto Regency has not been going well. Suggestions from researchers are more consistent in serving the elderly in the elderly Welfare Program, and the need for additional budgets to improve infrastructure and re-procure activities that have not been carried out.

Keyword: Implementation, Social Policy, Elderly Welfare Policy

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan dimana tatanan kehidupan spiritual, maupun material seimbang, selain itu juga terdapat keseimbangan antara jasmani dan rohani. Menurut Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menuturkan kesejahteraan sosial sebagai kondisi dimana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara dapat terpenuhi agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan masyarakat yang belum terpenuhi atas hak kebutuhan dasarnya dan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dapat disebut PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

Usaha pemerintah dalam membangun kembali kesejahteraan sosial adalah dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Salah satu upaya dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah dengan peningkatan kesejahteraan pada lanjut usia. Menurut hasil Susenas tahun 2016 (<http://www.depkes.go.id>), jumlah lansia Indonesia mencapai 22,4 juta jiwa atau 8,69% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia dengan jumlah

lansia terlanter sebanyak 2,1 juta jiwa dan lansia rawan terlanter sebanyak 1,8 juta jiwa.

Dari jumlah tersebut muncul beberapa masalah yang dihadapi oleh para lansia seperti masalah kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Dengan adanya masalah yang dihadapi oleh para lansia maka pemerintah dalam hal ini berupaya membangun dan meningkatkan kembali kesejahteraan lansia agar para lansia tetap dapat mendapatkan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Balai pelayanan sosial seperti panti dan pesanggrahan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terutama para lansia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yang di harap para lansia bisa mendapatkan perhatian, pelatihan, bimbingan, perawatan dan kesejahteraan kembali.

Tujuan pelayanan sosial lansia yang ada dalam panti menurut Permensos No.19 Tahun 2012 dalam Pasal 7 yaitu, (1) meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lanjut usia, (2) terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia, dan, (3) meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan maupun

menyediakan berbagai bentuk pelayanan lanjut usia. Panti dan pesanggrahan sendiri hampir merata ada di seluruh wilayah Indonesia dan sudah menjadi tugas bagi pemerintah setempat.

Pemprov Jatim dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lansia mengeluarkan PERDA Provinsi Jawa Timur, Nomor 5 Tahun 2007 tentang kesejahteraan lanjut usia. Dapat diketahui menurut BPS jumlah lansia tahun 2016 di Jawa timur sebanyak 11,88% dari penduduk Jawa Timur, yang diperkirakan pada tahun 2020 naik menjadi 13,48%. Berdasarkan data Dinamis Provinsi Jawa Timur tahun 2018, jumlah lansia terlantar di tahun 2015 sebanyak 135.800 juta jiwa, tahun 2016 sebanyak 145.492 juta jiwa, dan di tahun 2017 sebanyak 142.806 juta jiwa yang menunjukkan semakin bertambahnya lansia terlantar setiap tahunnya. Besarnya jumlah lansia juga menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat agar dapat mempersiapkan lansia yang sehat, mandiri dan tidak menjadi beban.

Kabupaten Mojokerto, menurut data BPS Kabupaten Mojokerto jumlah lansia di Kabupaten Mojokerto sebanyak 141.770. Sedangkan menurut BPS Kabupaten Mojokerto dalam angka 2019, diketahui jumlah lansia terlantar di Kabupaten Mojokerto sebanyak 7.561 jiwa. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto membuat Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2010, tentang Kesejahteraan lanjut usia yang memuat tentang upaya peningkatan kesejahteraan lansia di Kabupaten Mojokerto, terutama para lansia PMKS agar mereka dapat merasakan kehidupan layak di hari tua.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi lansia, ada banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat yaitu dengan adanya program kesejahteraan lansia, Program Kesejahteraan Lansia di Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Program Kesejahteraan lansia dalam panti dan luar panti. Program Kesejahteraan Lansia dalam panti dialkukan dengan memberi pelayanan dan rehabilitasi kepada lansia dengan memberi tempat tinggal yang layak, jaminan hidup berupa makanan, minuman, kesehatan, serta bimbingan mental, sosial, agama, keterampilan. Program kesejahteraan lansia luar panti dilakukan melalui program pemberian bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan), UEP (Usaha Ekonomi Produktif), KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yaitu dengan memberi uang kepada para lansia permeriman program sesuai

dengan nominal yang sudah ditentukan dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Program Kesejahteraan Lansia ini bertujuan untuk mencapai kemandirian lansia serta meningkatkan harapan hidup dan masa produktif bagi para lansia. Progran Kesejahteraan Lansia juga bertujuan agar kebutuhan dasar para lansia dapat terpenuhi, serta meningkatkan peran dari pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan pelayanan bagi para lansia. Sasaran Program Kesejahteraan Lansia sendiri merupakan Lansia usia 60 tahun ke atas.

Salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia adalah dengan adanya program kesejahteraan lansia di balai pelayanan sosial UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto. Menurut Sasmito dan Nawangsari dalam penelitiannya mengenai implementasi kebijakan menyatakan bahwa dalam mewujudkan *output* dan *outcomes* yang ditetapkan, maka suatu kebijakan publik perlu diimplementasikan. Tanpa implementasi maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit (2019: 68-74). UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit sendiri merupakan institusi sosial yang bertugas mengganti keluarga dalam upaya memberikan pelayanan, perawatan, dan rehabilitasi kepada para penyandang PMKS yang lebih terfokus pada lanjut usia terlantar, selain itu UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit merupakan salah satu panti jompo di Jawa Timur yang pengelolaannya masih di bawah Kabupaten. Dalam pelaksanaannya UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit berada pada naungan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang dipimpin langsung oleh Kepala Pesanggrahan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Program kesejahteraan lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit bertujuan untuk membantu para lansia PMKS untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial sebaik-baiknya, dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang diberikan di dalam pesanggrahan agar para lansia dapat menikmati taraf hidup yang layak di hari tua. Yang mana mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Lansia dan untuk lebih teknisnya mengacu pada Peraturan Bupati Mojokerto No 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Dalam implementasinya pesanggrahan juga bekerjasama dengan instansi lain seperti instansi pendidikan kesehatan yang bekerjasama di bidang akademik dengan melakukan praktek keperawatan

gerontik. Pesanggrahan juga bekerja sama dengan UPT Puskesmas Sooko untuk membantu dalam pelayanan kesehatan posyandu lansia.

Kelompok sasaran pada Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit sendiri diutamakan lansia berusia 55 tahun ke atas, mempunyai KTP berdomisili Kabupaten Mojokerto, tidak memiliki penyakit menular, dan ada yang bertanggung jawab atas lansia tersebut baik dari unsur keluarga, instansi pemerintah, organisasi maupun lembaga masyarakat.

Pesanggrahan Mojopahit memiliki 6 asrama yang digunakan untuk para lansia yang dapat menampung 50 orang. Adapun kegiatan dan pelayanan di dalam pesanggrahan yaitu, pelayanan kesehatan, senam rutin, kegiatan keagamaan, keterampilan, dan juga pendampingan. UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit saat ini memiliki 31 lansia yang di rawat dengan kuota 50 lansia. Perawat lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit ada dua yaitu perawat medis yang bertugas mengecek kondisi kesehatan lansia setiap harinya, dan perawat klien yang mempunyai tugas mengasuh dan membantu para lansia di setiap harinya seperti mandi dan makan, serta staff-staff lain yang juga ikut membantu.

Semua kebutuhan lansia mulai dari makanan, pakaian, obat-obatan, dll di tanggung oleh pihak pesanggrahan, sumber dana untuk pesanggrahan sendiri merupakan alokasi dari APBD Kabupaten Mojokerto, dan sumber-sumber dana lainnya yang tidak mengikat seperti sumbangan-sumbangan dari individu maupun kelompok masyarakat.

Pelaksanaan Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit terdapat beberapa kendala yaitu terdapat ketidak puasan kelompok sasaran terhadap perawat medis karena kinerja perawat medis yang dirasa kurang maksimal. Lansia harus mencari perawat medis dahulu jika ingin membutuhkan bantuan kesehatan, karena pada implementasinya para perawat medis yang ada di Pesanggrahan setelah memeriksa tekanan darah lansia yang dilakukan rutin setiap pagi mereka langsung kembali tanpa melakukan tugas selanjutnya dimana mereka seharusnya ada di asrama untuk siap sedia bila ada lansia sakit yang membutuhkan bantuan medis. Masalah selanjutnya yaitu sumberdaya untuk merawat klient kurang, karena di pesanggrahan hanya terdapat 3 perawat klient yang pada implementasinya mereka merasa kualahan

terutama untuk merawat lansia di asrama empat, lima, enam yang sudah total care.

Kendala yang selanjutnya adalah kegiatan yang tidak berjalan di dalam UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit sehingga lansia yang ada di pesanggrahan kurang ada kegiatan. Karena dalam implementasinya seharusnya terdapat kegiatan berupa bimbingan kesehatan, senam rutin, bimbingan keagamaan, keterampilan, dan juga pendampingan, tetapi kegiatan keterampilan dan pendampingan sudah tidak berjalan lagi saat ini.

Kendala selanjutnya mengenai sarana dan prasarana di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit, karena ada beberapa bangunan yang sudah tidak layak untuk digunakan dan perlu untuk dilakukan direnovasi demi keamanan dan kenyamanan penghuni pesanggrahan.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Implementasi Program Kesejahteraan Lansia ini. Adapun judul penelitian ini adalah “Implementasi Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto.”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah kriteria implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:91), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan, maka dapat dilakukan analisis Implementasi Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto menggunakan kriteria implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Teori tersebut meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut:

1. Komunikasi

Adanya komunikasi penting karena implementator dan kelompok sasaran dapat memahami isi, tujuan, dan sasaran dari pelaksanaan

kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ningrum, Khaidir, dan Alhadi. dalam penelitiannya mengenai implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa dalam komunikasi setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan harus disosialisasikan kepada kelompok sasaran dengan transmisi, kejelasan dan konsistensi (2018:12-18). Berikut 3 (tiga) dimensi yang ada dalam komunikasi antara lain transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi.

Pertama yaitu transmisi atau penyaluran komunikasi yang baik, dalam Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto terdapat komunikasi internal yang terjadi yaitu antara ketua Pesanggrahan dengan para staff di pesanggrahan yang disampaikan baik dalam bentuk formal seperti rapat staff maupun non formal layaknya atasan dan bawahan. Komunikasi internal juga terjadi antara pelaksana dan kelompok sasaran berupa penyampaian kegiatan yang akan di lakukan, sehingga para lansia dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti acara atau kegiatan yang akan diadakan.

Adapun komunikasi eksternal yang terjadi, yaitu antara TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang berkoordinasi dengan camat, lalu akan diteruskan ke perangkat-perangkat desa untuk menyampaikan ke masyarakat jika terdapat lansia terlantar di wilayah desa mereka agar di arahkan ke UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit. Selain sosialisasi yang dilakukan oleh TKSK tentang adanya pesanggrahan, komunikasi eksternal juga terjadi antara pihak UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit dengan Koordinator dari Dinas Sosial.

Komunikasi yang terjalin antara koordinator dan pihak pesanggrahan berupa kunjungan atau survey dan memberi penilaian kepada para staff di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit baik secara informal langsung ataupun formal berupa penilaian kinerja, dengan aspek penilaian antara lain kedisiplinan, tangung jawab, kemauan dan kemampuan, koordinasi, serta kepedulian. Selain itu pihak pesanggrahan juga wajib memberi laporan SPJ dan LPJ kepada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto melalui koordinator.

UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto juga bekerja sama dengan instansi lain, yaitu instansi pendidikan kesehatan dan UPT Puskesmas Sooko. Kerjasama yang terjalin dengan instansi pendidikan kesehatan yaitu berupa praktek keperawatan gerontik yang kegiatannya antara lain yaitu melakukan perawatan kepada para lansia, dan membuat asuhan keperawatan terapi aktifitas yang nantinya akan di konsulkan pada para perawat medis di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit

Kabupaten Mojokerto. Sedangkan kerja sama yang terjalin dengan UPT Puskesmas Sooko yaitu posyandu lansia yang rutin setiap bulannya dan wajib diikuti semua lansia di pesanggrahan.

Indikator selanjutnya adalah kejelasan informasi, kejelasan informasi sendiri ditujukan agar informasi yang dimuat jelas dan mudah untuk dipahami. Dalam Program Kesejahteraan Lansia di Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto sudah memberikan kejelasan informasi yang cukup baik dalam pelaksanaannya dapat di lihat dari pahamnya para pelaksana terkait tujuan dari Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit. Tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para lansia terutama untuk lansia terlantar agar dapat memperpanjang usia harapan hidup mereka dan masa produktif mereka, dan juga dapat mencapai kemandirian dengan memberi pelayanan dan rehabilitasi meliputi bimbingan mental, sosial, fisik dan kesehatan, serta keterampilan. Pernyataan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Indikator selanjutnya dalam komunikasi yaitu konsistensi, konsistensi pada Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit sudah cukup baik. Dapat dilihat dari laporan SPJ dan LPJ yang dilakukan rutin setiap bulan sekali kepada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto melalui koordinator dari Dinas Sosial. Laporan SPJ dan LPJ tersebut digunakan untuk bukti belanja dan juga digunakan untuk bukti pelaksanaan kegiatan di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto, yang nantinya akan diserahkan kepada Kepala Dinas.

Konsistensi yang ada pada Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit dapat dilihat juga dari pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang ada di pesanggrahan antara lain senam pagi yang dilakukan setiap hari kamis pagi, pelayanan kesehatan dilakukan setiap hari, dengan rutin mengecek tekanan darah lansia setiap pagi dan sore hari dan di lanjutkan dengan penjemuran lansia. Selain itu juga dilakukan posyandu lansia yang di adakan setiap satu bulan sekali di minggu ke empat, bimbingan agama dilakukan setiap hari senin sore dan kamis sore berupa istigosah dan tahlil, kegiatan keterampilan yaitu digunakan untuk terapi motorik dan hiburan bagi para klient, dan yang terakhir pendampingan yaitu dilakukan untuk memantau para klient secara intensif dengan melakukan pendekatan personal.

Dari adanya kegiatan-kegiatan tersebut terdapat masalah dimana kegiatan keterampilan sudah tidak dilaksanakan lagi. Hal ini karena faktor internal yaitu lansia yang dirasa sudah kesulitan untuk diberdayakan pada kegiatan tersebut karena kurang lebih separuh dari jumlah lansia yang ada di pesanggrahan sudah total *care*, dan mereka juga cenderung malas mengikuti kegiatan keterampilan tersebut jika tidak di embel-embeli dengan adanya penyediaan konsumsi, dan hasil dari keterampilan yang sudah di buat tersebut tak jarang di jual oleh mereka secara pribadi ke pasar.

Komunikasi yang terjadi pada Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik karena selalu terdapat komunikasi dan koordinasi yang baik secara formal maupun non formal di setiap kegiatan sehingga penyampaian informasi yang di terima lebih jelas dan terarah. Dalam pelaksanaan program ini para implementor juga paham akan tujuan dari program, hal ini membuktikan bahwa para pelaksana sudah paham dan jelas akan tujuan, manfaat, dan sasaran dari program ini. Dengan begitu pelaksana akan mempersiapkan apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan program. Jadi kesiapan dan komunikasi yang baik akan mendorong para pelaksana untuk lebih meningkatkan pelayanan yang di berikan kepada kelompok sasaran.

Akan tetapi dapat dilihat dari aspek konsistensi masih memiliki masalah dimana yang seharusnya dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit mempunyai fungsi untuk memberi pelayanan dan rehabilitasi kepada para lansia yaitu salah satunya dengan adanya kegiatan keterampilan. Akan tetapi kegiatan keterampilan sudah tidak berjalan lagi, dikarenakan faktor dari kelompok sasaran sendiri.

2. Sumberdaya

Implementasi suatu kebijakan sangat memerlukan dukungan dari sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, maupun sumberdaya fasilitas yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Sumberdaya manusia sangat penting dalam suatu implementasi kebijakan. Menurut data yang telah di dapat oleh peneliti bahwa implementasi program kesejahteraan lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto dilaksanakan oleh Kepala Pesanggrahan yang bertugas dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala pesanggrahan juga dibantu oleh perawat medis, perawat klien, psikolog, penceramah agama, dan para staff lainnya.

Dalam hal ini perawat medis dan perawat klien lah yang berperan penting karena mereka bertugas langsung untuk merawat para lansia dan menjaga kondisi para lansia, jika dilihat dari jumlah perawat medis sebanyak 4 orang dan perawat klien sebanyak 5 orang yang sebelumnya hanya berjumlah 3 orang dengan jumlah lansia sebanyak 34 orang maka jumlah tersebut sudah cukup. Karena menurut kepala Pesanggrahan jumlah perawat dan lansia harus seimbang, selain itu juga ada staff lainnya seperti kebersihan, sopir, juru masak dll. Maka jumlah sumberdaya manusia yang ada sudah cukup untuk mengimplementasikan program kesejahteraan lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit.

Perawat medis yang ada di pesanggrahan memang di utamakan agar sesuai dengan bidang yang ada yaitu ilmu keperawatan, hal ini dilakukan agar mereka lebih mudah dalam menangani kesehatan para lansia. Kriteria perawat klien yang bekerja di pesanggrahan di utamakan mereka yang mau mengurus lansia dengan baik. Tidak ada kriteria khusus seperti pendidikan karena sudah dilakukan *training* terlebih dahulu selama 3 minggu sebelum menjadi perawat klien di pesanggrahan, karena memang terdapat lansia yang statusnya total *care* dan memang butuh penanganan khusus.

Implementasi kebijakan juga membutuhkan sumberdaya anggaran. Menurut kepala Pesanggrahan, sumberdaya yang di dapatkan untuk Implementasi Program Kesejahteraan lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto yaitu dari APBD kurang lebih sebesar Rp. 750.000.000 per tahun, uang tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan para lansia seperti makan, minum, obat-obatan, kebutuhan lain seperti membayar listrik, air, kebutuhan perbaikan dan renovasi, serta kebutuhan mendadak lainnya. Selain itu anggaran tersebut juga digunakan untuk menggaji para pegawai karena status pegawai yang ada di pesanggrahan merupakan pegawai honorer non pns kecuali kepala Pesanggrahan. Untuk membantu meringankan dan memenuhi kebutuhan yang ada, UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit juga mengandalkan sumber dana lain yang tidak mengikat dari pihak ke 3 (tiga) seperti para donatur, kepala Pesanggrahan juga menegaskan bahwa kebutuhan pokok para lansia seperti makanan, minuman dan obat-obatan lebih di utamakan dibanding kebutuhan lainnya.

Selain sumberdaya manusia dan sumberdaya anggaran, dalam implementasi kebijakan juga harus di dukung dengan sumberdaya fasilitas atau sarana dan prasarana agar pelaksanaan kebijakan lebih maksimal dan memuaskan. Menurut kepala Pesanggrahan ada beberapa bangunan yang perlu dilakukan perbaikan demi kenyamanan bersama,

seperti atap plavon karena sudah banyak yang mengalami pelapukan, lalu genteng asrama mahasiswa magang yang sudah ambrol sehingga akan berbahaya jika terjadi hujan, selain itu juga perlu adanya perbaikan di asrama 6 kamboja karena bangunan yang ada di anggap sempit pendek, dan kurang ventilasi yang menimbulkan rasa gerah di dalamnya, padahal lansia yang tinggal di asrama 6 merupakan lansia yang mempunyai kondisi total *care* parah.

Adapun masalah sarana di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit yaitu kursi roda yang sudah tidak layak di gunakan, kondisi kursi roda yang ada sudah banyak yang tidak layak karena dudukan yang sobek maupun pijakan kaki yang patah. Selain itu terdapat *komplain* dari klient mengenai lampu karena kondisi lampu yang tidak terang sehingga para lansia dengan keterbatasan pengelihan akan susah bila akan melakukan aktivitas pada malam hari.

Dapat disimpulkan bahwa sumberdaya untuk Program Kesejahteraan lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit perlu di tingkatkan lagi terutama pada sumberdaya anggaran dan sumberdaya fasilitas agar tujuan dari program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Sumberdaya finansial harus diperhatikan agar dalam pelaksanaan program dapat ditingkatkan secara kualitas dan tidak terlalu bergantung dengan anggaran yang diberi oleh pihak ke 3 (tiga) atau donatur sehingga bisa menutupi atau memperbaiki sarana dan prasarana yang harus di perbaiki dan diganti serta melengkapi kebutuhan lainnya.

3. Disposisi

Disposisi sangat penting, karena sikap dan karakteristik dari agen pelaksana berperan penting untuk mewujudkan implementasi sebuah kebijakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Ningrum, Khaidir, dan Alhadi, dalam penelitiannya mengenai implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa dalam keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh sikap dan kemauan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut (2018:12-18). Dapat dilihat dari sikap yang diberikan pelaksana dimana pesanggrahan selalu memberikan perawatan dan pelayanan yang terbaik untuk para lansia agar mereka mendapat kelayakan di hari tuanya, sikap yang ditunjukkan para staff juga positif dalam menjalankan program kesejahteraan lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit dengan saling membantu satu sama lain dalam bekerja dan memperlakukan para lansia sebagaimana tugas

mereka. Selain itu sikap dan karakteristik juga dapat di lihat dari tanggungjawab yang diberikan oleh kepala Pesanggrahan, kepala Pesanggrahan bertanggungjawab atas semua lansia, staff pegawai, dan semua pelaksana kegiatan di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto.

Sikap yang ditunjukkan yaitu dengan adanya masalah kegiatan keterampilan yang tidak lagi berjalan selama satu tahun terakhir, kepala pesanggrahan berinisiatif untuk mengadakanya lagi dengan kegiatan berkebun agar para lansia juga mempunyai kegiatan sehari-harinya dan tidak makan tidur saja. Tanggungjawab yang diberikan kepala Pesanggrahan juga dapat di lihat dengan evaluasi rutin melalui rapat pegawai, hal ini dilakukan untuk menghandel kinerja dari para staff di pesanggrahan, selain itu evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui apa saja yang kurang dan perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program.

Adapun masalah yang ditemukan, menurut beberapa sumber terdapat masalah dimana kinerja perawat medis sebagai pelaksana program yang kurang optimal, sehingga membuat kelompok sasaran merasa kurang puas akan sikap yang ditunjukkan. Yaitu dimana para lansia harus mencari perawat medis terlebih dahulu jika mereka membutuhkan bantuan, yang seharusnya para perawat medis harus selalu ada di asrama agar *standby* bila ada salah satu lansia yang membutuhkan bantuan kesehatan. Mengingat kondisi lansia di asrama 4,5,6 yang sudah berstatus total *care* sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pada lansia lainnya.

Menurut paparan yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa sikap yang diberikan para pelaksana sudah cukup baik dengan sikap yang ditunjukkan oleh para pelaksana yang melayani para lansia dengan baik dan ketua pelaksana yang memiliki komitmen agar program kesejahteraan lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto sesuai dengan tujuan, akan tetapi perlu di perbaiki dalam beberapa hal, terutama untuk sikap yang ditunjukkan perawat medis. Perawat medis harus selalu siap bila mana ada lansia yang membutuhkan bantuan kesehatan, agar dalam implementasi program kesejahteraan lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto kelompok sasaran lebih terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat penting dalam implementasi kebijakan. Dalam struktur birokrasi juga terdapat 2 (dua) karakteristik, yaitu SOP (*Standart Operational Procedure*) dan fragmentasi. SOP digunakan sebagai acuan kerja dalam bekerja

sehingga SOP harusnya mencantumkan kerangka kerja yang sistematis, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami. Dengan dibuatnya SOP diharap para pelaksanaan dalam bekerja dapat sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam SOP yang akan memberikan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja, untuk struktur organisasi, implementator dari sebuah kebijakan juga hendaknya menghindari hal-hal yang bersifat rumit, panjang, dan kompleks.

Dalam implementasinya program ini berpedoman pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut usia dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Untuk lebih teknis pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. SOP yang ada di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit berisi tentang standar pelayanan kinerja pegawai dan standart pelayanan kegiatan pada program kesejahteraan lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit, selain itu juga ada standart pelayanan penerimaan calon lansia. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto yaitu dari Kepala Dinas yang turun langsung ke Kepala Pesanggrahan, sehingga kepala Pesanggrahan memiliki tugas dan wewenang langsung kepada UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit sendiri dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui bidang terkait.

UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto sudah memiliki SOP yang benar dan struktur birokrasi yang jelas, yang ada di Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mengenai susunan organisasi, kedudukan, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit yang dimaksudkan agar mempermudah dalam melakukan pelayanan dan pembagian tugas.

Dapat disimpulkan UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit sudah memiliki struktur birokrasi yang jelas, tidak rumit, dan tidak berbelit-belit sehingga lebih mudah dalam pengawasan, juga lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program. SOP yang di miliki UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit pun juga baik dan jelas sehingga para pelaksana mudah memahami dan dengan mudah menjalankan tugas tanpa melenceng dari tujuan dan sasaran dari kebijakan atau program yang dijalankan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dengan pemaparan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi dari Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto merupakan pemberian bantuan dan perlindungan sosial kepada lansia oleh pemerintah daerah berupa pelayanan dan rehabilitasi meliputi pemberian bimbingan mental, fisik, sosial, dan keterampilan. Program kesejahteraan lansia ini dilaksanakan dalam panti dengan sasaran lanjut usia 55 tahun ke atas dan memiliki KTP berdomisili di Kabupaten Mojokerto. Dalam program ini yang lebih diutamakan yaitu para lanjut usia terlantar, baik terlantar secara ekonomi maupun terlantar secara sosial. Dalam pelaksanaannya program kesejahteraan lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut usia dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Untuk lebih teknis mengacu pada Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Implementasi Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit dikaji dengan menggunakan kriteria implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Dalam kriteria Komunikasi pelaksanaan Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik karena selalu ada komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dalam setiap kegiatannya yang di sampaikan baik secara formal maupun non formal, dengan begitu akan memberi kejelasan dan arah kepada para pelaksana sehingga dalam menjalankan tugas akan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Dinilai dari kriteria sumberdaya, maka pelaksanaan Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto masih kurang. Dalam segi sumberdaya fasilitas yang masih perlu dibenahi lagi, seperti perlu diadakanya renovasi dan perbaikan serta pengadaan barang baru. Karena masih ada fasilitas yang membuat para kelompok sasaran kurang puas. Sumberdaya manusia yang ada di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit sudah mencukupi dan sesuai bidang, karena jumlah perawat dan lansia harus seimbang. Selanjutnya untuk sumberdaya finansial Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto berasal dari APBD Kabupaten Mojokerto dan sumber dana lain yang tidak mengikat seperti dari pihak ke 3 (tiga) atau donatur.

Dinilai dari kriteria disposisi sudah baik bila dilihat sikap yang diberikan para pelaksana kebijakan yaitu Ketua pelaksana dan jajaran staff dibawahnya. Sikap dari Ketua Pelaksana dapat di lihat dari tanggungjawab yang diberikan oleh kepala Pesanggrahan dengan diadakannya evaluasi melalui rapat pegawai untuk mengetahui kinerja serta apa saja yang kurang dan perlu diperbaiki dalam menjalankan Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit. Sikap yang ditunjukan para staff di pesanggrahan juga positif karena mereka sudah berusaha melayani para lansia dengan baik sebagaimana tugas mereka dan juga saling membantu dalam menjalankan tugas. Sikap tanggungjawab pelaksana yang ada juga dapat dilihat dari inisiatif Kepala pesanggrahan yang akan mengadakan kembali kegiatan keterampilan yang sudah tidak berjalan satu tahun terakhir. Adapun yang harus diperbaiki dari sikap pelaksana yaitu perawat medis yang harusnya selalu *stanby* agar memudahkan para lansia jika membutuhkan bantuan.

Dinilai dari kriteria struktur birokrasi sudah baik karena sudah memiliki SOP dan struktur organisasi yang baik dan jelas berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang memuat mengenai susunan organisasi, kedudukan, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit. Selain itu UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit juga memiliki struktur organisasi yang jelas, dan tidak berbelit-belit dan mudah dalam pengawasan, yaitu kedudukan kepala Pesanggrahan yang berkedudukan langsung di bawah kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas, serta mempunyai tugas dan wewenang sepenuhnya terhadap berjalannya Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan anggaran dalam Program Kesejahteraan Lansia, agar dapat menambah dan memperbaiki sumberdaya fasilitas sarana dan prasarana untuk kenyamanan dan keamanan lansia di pesanggrahan atau panti, selain itu juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lansia lainnya agar tidak terlalu bergantung oleh pihak ke 3 (tiga) atau donatur.
2. Dalam Implementasi Program Kesejahteraan Lansia diharap pelaksana lebih konsisten dalam menjalankannya, dengan menjalankan semua kegiatan dan pelayanan karena merupakan salah satu tugas dan fungsi dari pesanggrahan dalam

memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada kelompok sasaran. Karena di setiap kegiatan juga memiliki tujuan dan manfaat masing-masing untuk para lansia.

3. Dalam implementasi Program Kesejahteraan Lansia diharap Para pelaksana lebih konsisten lagi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada lansia agar para lansia sebagai kelompok sasaran merasa terpuaskan atas pelayanan yang diberikan.
4. Perlu adanya nurse call atau tombol darurat di setiap kamar di asrama, untuk memudahkan lansia jika membutuhkan sesuatu terutama pada lansia total care, mengingat lansia yang identik memiliki kondisi fisik yang lemah dan bisa sewaktu-waktu sakit.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, diantaranya:

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing.
3. Tjijik Rahaju, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji
4. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A. selaku dosen penguji.
5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberikan dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. (2012) Kebijakan Publik, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika
- Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ihsan, M. Nur. (2017) Jurnal "*Implementasi Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus di Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*". (Jurnal Skripsi, Mahasiswa Universitas Lampung)
- Islamy, Irfan M. 2009. Prinsip-Prinsip Pedoman Kebijakan Negara. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ningrum, Khaidir dan Alhadi. 2018. *Implementasi Kebijakan Rektor Tentang Tata Krama dan Etika Mahasiswa di UKM/Ormawa*

- Universitas Negeri Padang*. JPSI (during), Vol .3, No 1, November Tahun 2018: 12-18.
(<https://journal.unesa.ac.id/index.pp/jpsi>)
- Ramadhan, M. Quraissy. (2017) Jurnal “*Pelayanan Sosial Terhadap Lanjut usia (Studi pada UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda)*”. (Jurnal Skripsi, Mahasiswa Universitas Mulawarman)
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012. Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2010. Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto 25 Tahun 2018. Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.
- Rangkoly, Ivo. (2014) Jurnal “*Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat*”. (Jurnal Skripsi, Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi)
- Sasmito, dan Nawangsari. 2019. *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu*. JPSI (during), Vol .3, No 2, Mei Tahun 2019:68-74.
(<https://journal.unesa.ac.id/index.pp/jpsi>)
- Silviany, Mona. (2015) Jurnal “*Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kecamatan Palu Barat Kota Palu*”. (Jurnal Skripsi, Mahasiswa Universitas Tandulako)
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tauran dan Prabawati, Indah. 2015. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Unesa University Press.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.